

Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024)

Matias Patriano Vano*

Sekolah Tinggi Filsafat Teknologi Widya Sasana, Jl. Terusan Rajabasa No.2, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia.

*korespondensi penulis vanomatias198@gmail.com

Informasi Artikel

Received:

24/04/2024

Accepted:

30/04/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kekuasaan menurut Niccolò Machiavelli dan relevansinya dalam konteks etika politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelusuri pandangan Machiavelli tentang kekuasaan, terutama dalam karya utamanya, "Il Principe", yang menekankan pragmatisme, realisme politik, dan justifikasi penggunaan cara-cara yang dianggap tidak etis demi mencapai tujuan politik. Analisis ini kemudian diterapkan untuk menilai dinamika etika politik selama pesta demokrasi 2024 di Indonesia, yang seringkali diwarnai dengan strategi-strategi politik praktis yang mirip dengan pandangan Machiavellian. Hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak aspek kampanye dan strategi politik kandidat dalam pemilu 2024 mencerminkan prinsip-prinsip Machiavellian, seperti manipulasi, propaganda, dan penggalangan kekuatan melalui aliansi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kekuasaan Machiavellian dapat memberikan wawasan kritis terhadap praktik etika politik di Indonesia dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang moralitas dalam politik di Indonesia.

Kata kunci : demokrasi, etika politik, kekuasaan

ABSTRACT

This study examines the concept of power according to Niccolò Machiavelli and its relevance in the context of political ethics during the 2024 Indonesian Presidential and Vice-Presidential election. Utilizing a descriptive qualitative approach, this research explores Machiavelli's views on power, particularly in his seminal work "Il Principe," which emphasizes pragmatism, political realism, and the justification of using methods deemed unethical to achieve political goals. This analysis is then applied to assess the dynamics of political ethics during the 2024 democratic process in Indonesia, often marked by practical political strategies that resemble Machiavellian perspectives. The findings indicate that many aspects of the campaigns and political strategies of the candidates in the 2024 election reflect Machiavellian principles, such as manipulation, propaganda, and the consolidation of power through political alliances. The study concludes that a deeper understanding of Machiavellian concepts of power can provide critical insights into the practice of political ethics in Indonesia and encourage further discussion on the morality of politics.

Keywords: authority, democracy, political ethics

Copyright © 2024 (Matias Patriano Vano). All Right Reserved

How to Cite: Vano, M.P. (2024). Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 407-418. DOI. 10.21009/jimd.v23i2.45182



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Persoalan demokratis yang dibahas dalam tulisan ini menyoroti secara spesifik persoalan demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024 dalam konsep kekuasaan Niccolò Machiavelli (Filsuf Italia). Titik tolak pemikiran Niccolò Machiavelli tentang kekuasaan dari seorang penguasa adalah berupaya untuk mempertahankan kedudukan tersebut dengan menghalalkan segala cara. Pemikiran politik Machiavelli adalah bagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah negara, oleh karena itu negara dalam pendiriannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Menurut Machiavelli, kekuasaan memiliki otonomi yang terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat yang mengabdikan pada jaminan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan kepada kepentingan negara (Ladkin & Probert, 2019).

Penguasa berhak melanggar hak-hak rakyatnya bilamana dianggap menghalangi tujuan dan cita-cita penguasa (Duffy, 2020). Machiavelli berpendapat bahwa manusia beradab hampir pasti akan menyeimbangi egositas yang tidak bermoral. Jika seseorang menginginkan untuk mendirikan Negara Republik, Machiavelli mengungkapkan, ia akan merasa lebih mudah untuk meraihnya, dibandingkan dengan seseorang dari kota besar, karena yang kondisinya sudah rusak. Jika seorang egois yang tidak bermoral, dia akan bijak dalam bertindak serta tetap menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi (Raine & Uh, 2019). Penelitian Maiwan (2019) menguraikan bahwa dalam pandangan Machiavelli, Nasib adalah Dewi dalam kehidupan yang mana kita patut memberikan perhatian kepadanya, karena ia dapat memberikan keberuntungan ataupun kecelakaan. Argumentasi tentang Nasib ini berseberangan dengan pandangan Machiavelli yang sejauh ini dikenal cukup liberal dalam bidang politik dan kenegaraan (Kodera, 2022). Di sisi lain, pemikiran Machiavelli tentang virtue dan fortune, menciptakan suatu kesenjangan moral antara tradisi moralis klasik (Yunani dan Romawi kuno) dan zaman Renaisans, serta dilema moralitas baru kekuasaan. Maiwan (2019) yang mengulas tentang dua aspek dasar pandangan Machiavelli yaitu virtue dan fortune. Menarik bahwa kedua konsep ini menjadi sarana yang dipakai oleh Machiavelli untuk menilai Cesare Borgia yang gagal karena tidak memiliki fortune atau unsur keberuntungan dari pribadi seseorang yang dalam konteks pemikiran Machiavelli yakni seorang pangeran. Dapat dikritisi bahwa konsep fortune dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tidak dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan, namun merupakan suatu misi yang memang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan memperkokoh kekuasaan, kedudukan dalam sebuah pemerintahan (Suftyadi et al., 2023). Namun tulisan ini akan mencoba memadukan dua penelitian sebelumnya dengan merangkum bahwa masyarakat yang demokratis sesungguhnya dapat dimanipulasi oleh sekelompok orang tertentu demi terwujudnya kepentingan pribadi maupun kelompok. Mendahului kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sama halnya dengan meruntuhkan sistem demokrasi secara perlahan dan suatu saat pasti akan menemukan kehancuran yang hebat (Lührmann & Rooney, 2020). Seorang dalam penguasa tidak dapat membatasi diri pada aspek keberuntungan semata melainkan bagaimana kemampuan (virtue) yang dimiliki oleh seorang penguasa mampu memberi pengaruh terhadap polis-nya demi suatu tujuan yang luhur dan kebaikan bersama (Tholen, 2018).

Penelitian Qomariyah (2024) penelitian ini adalah bahwa Niccolò Machiavelli, meskipun dianggap sebagai politikus tak bermoral, menelurkan sebuah gagasan kekuasaan yang retrospektif yang bisa digunakan untuk menanggulangi permasalahan lama, yang diprakarsai oleh nilai moral gereja, dianggap tidaklah cocok untuk digunakan oleh seorang penguasa kepada rakyatnya. Moralitas gereja sangat lemah sehingga tidak

memiliki kemampuan untuk membangun pengaruh penguasa atas rakyatnya (de Villiers, 2020). Moralitas semacam itu bukanlah moralitas yang baik karena moralitas dalam politik adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Menyimak beberapa urai yang dilakukan oleh Mukhtar (2018), Maiwan (2019), dan Qomariyah (2024) sangat detail dan cukup memberi kontribusi kepada penulis dalam memahami pemikiran Machiavelli terutama dalam mengulas tulisan ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu masih berciri holistik. Artinya bahwa penjelasan terbatas pada penguraian konsep-konsep kekuasaan Machiavelli, unsur-unsur mitos dan signifikasinya dalam bidang moral tetapi belum mengacu pada solusi nyata dan pada situasi sosial politik dewasa ini dan belum memperlihatkan upaya-upaya pihak tertentu dalam mempertahankan eksistensi dari demokrasi itu sendiri dan menyurutkan keinginan berkuasa dari figure-figur tertentu dalam sebuah polis (dalam pembahasan ini akan diuraikan secara jelas isu-isu kecurangan politik selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024). Oleh karena itu, masukan dari penulisan artikel ini mau menyoroti dari runtuhnya kesadaran dan kewibawaan seorang pemimpin demi melanggengnya kekuasaan atau jabatan dengan melakukan berbagai macam cara. Dengan demikian, kritik dan aksi-aksi mesianik dari para akademisi sangat berguna dalam membangun kesadaran public atas fenomena politik di Indonesia selama proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Berlandaskan penjelasan di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada usaha-usaha para akademisi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam mengkritisi perilaku para agen politik terutama yang meruntuhkan demokrasi dan martabat luhur rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pemilihan umum (pemilu) dimana semangat seluruh bangsa Indonesia dalam menyongsong pemimpin baru telah luntur oleh isu-isu kecurangan terhadap demokrasi dan cita-cita luhur dalam menyongsong “Indonesia Emas” pada tahun 2045 melahirkan banyak pertanyaan sinisme yang cukup mendalam. Oleh karena itu, kritik dan protes para akademisi dari setidaknya 70 universitas, dan ratusan aktivis sipil dari sekurangnya 20 organisasi, harus dimaknai sebagai upaya untuk mengisi disfungsi partai dalam kerja pendidikan politik ini. Alih-alih melihatnya sebagai kesombongan tersembunyi. Teguran itu adalah pengingat bahwa nilai-nilai dan etika demokrasi harus kembali dipeluk dan dilaksanakan sepenuh hati (Schroeder, 2021).

Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan kajian studi pustaka. Secara teoritis, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zhang et al., 2024). Kajian studi Pustaka ini juga memakai pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkritisi konsep kekuasaan Niccolo Machiavelli dalam konteks fenomena politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada tahun 2024. Rujukan-rujukan utama dalam mengulas konsep kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli ini menggunakan tinjauan literatur studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan-laporan yang berkaitan dengan politik dari berita-berita yang berhubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024.

Adapun hal-hal spesifik dalam penelitian yang mengulas tentang konsep kekuasaan pada ranah pemerintahan, baik pada ruang lingkup legislatif, yudikatif, maupun eksekutif namun tetap bertitik tolak pada esensi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Langkah awal dalam menyusuri penelitian ini memasukan juga referensi-referensi yang terkait dengan teori-teori kepemimpinan, cara-cara untuk mempertahankan kepemimpinan, demokrasi, serta aspek-aspek yang menjadi persoalan utama penelitian ini, yakni etika berpolitik di Indonesia.

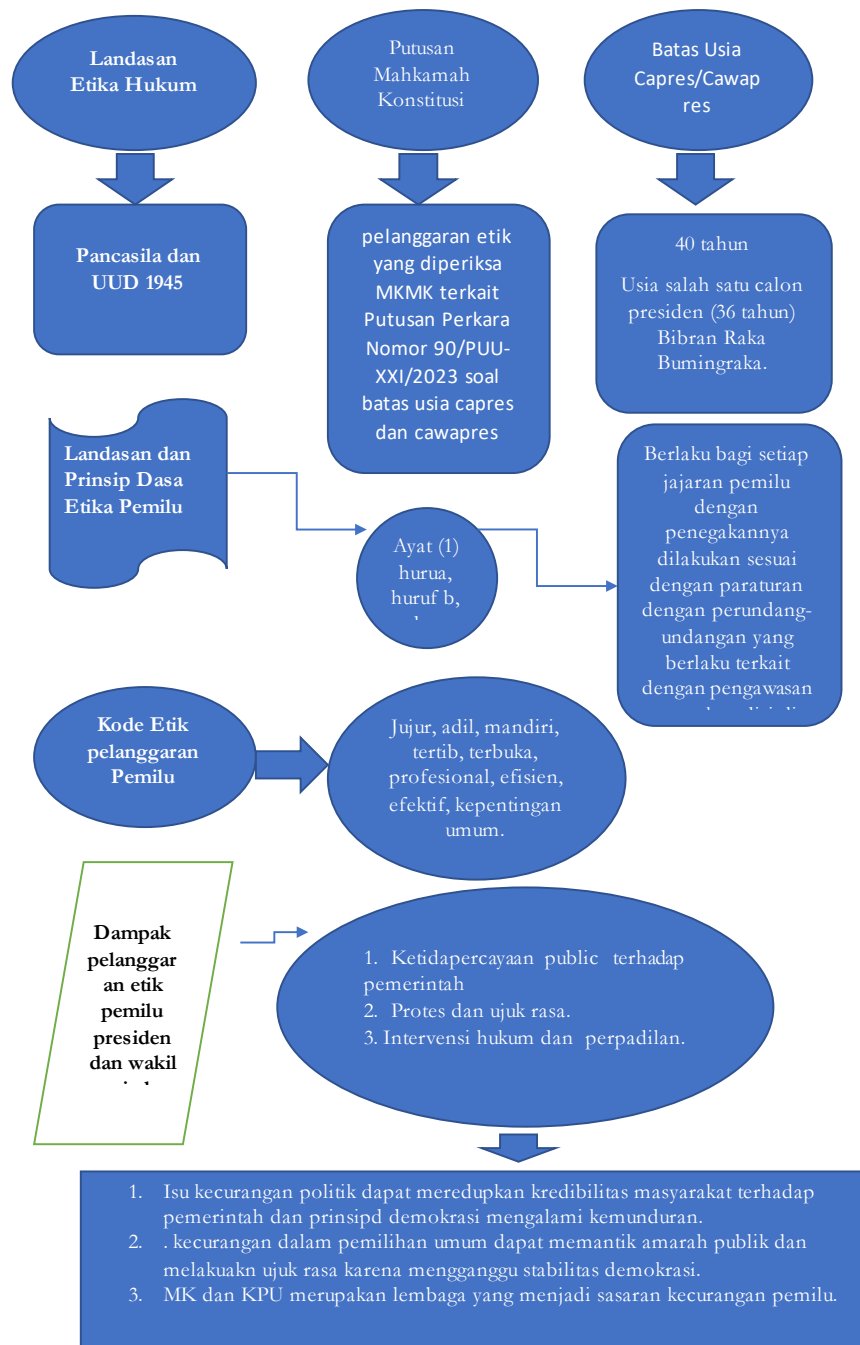
Latar Belakang Konsep Kekuasaan Menurut Machiavelli

Menurut Machiavelli, tujuan dibentuknya negara adalah murni untuk kekuasaan. Kekuasaan berarti kebebasan manusia untuk bertindak sesuai kemauan naluriah manusia itu sendiri. Kebebasan adalah unsur yang membentuk pola perilaku defensif warganya untuk tetap mendapatkan kebebasan yang telah mereka miliki dan mempertahankan kebebasan tersebut. Oleh karenanya melalui kekuasaan, seseorang bisa menjaga sebuah kota dan yang terbiasa pada kebebasan akan mempertahankannya dengan lebih mudah dengan cara-cara yang dilakukan warganya sendiri ketimbang cara-cara lainnya. Biarkan dia bertindak seperti pemanah yang kelihatannya sangat jauh jaraknya, dan mengetahui batas-batas kekuatan yang bisa dicapai anak panahnya, membidik jauh di atas sasaran bidikannya, bukan berusaha mencapainya dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan anak panahnya diarah yang begitu tinggi, tetapi berusaha untuk bisa dengan bantuan sasaran bidik yang cukup tinggi itu untuk membidik sasaran yang ingin dicapainya.

Kondisi politik yang kerap kali berubah berkat perebutan kekuasaan revolusioner di Florensia inilah yang menumbuhkan minat filsuf dan diplomat Italia, Niccolo Machiavelli pada filsafat politik pragmatis ((Maher, 2020; Vavouras & Theodosiadis, 2024). Machiavelli menulis sebuah buku berjudul *Il Principe* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Prince* atau Sang Pangeran dalam bahasa Indonesia. Buku ini merupakan hasil pengamatannya pada beberapa gaya kepemimpinan pangeran-pangeran di Italia. Dalam buku ini, Machiavelli merumuskan dua unsur yang harus dimiliki oleh seorang pangeran, yaitu *virtue* dan *fortune* Maiwan (2019). *Virtue* adalah kemampuan dasar kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pangeran. Kemampuan dasar ini meliputi bagaimana cara seorang pangeran merawat kestabilan politik di suatu dominion atau negara. Seorang pangeran harus pandai membaca situasi dan memilih tindakan yang tepat untuk setiap masalah di negaranya. Melalui tulisan ini, penulis hendak menggali esensi dari apa yang dimaksudkan dengan konsep kekuasaan itu sendiri. Penulis sendiri akan menguraikan apa itu kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan tersebut dalam sebuah bangsa atau negara menurut Niccolo Machiavelli. Namun, sebelum mengenal pemikiran Niccolo Machiavelli, ada baiknya sedikit menguraikan siapakah Niccolo Machiavelli dalam dunia politik. Niccolo Machiavelli merupakan seorang filsuf Italia yang diberi julukan oleh Shakespeare kepadanya (Machiavelli) sebagai “teladan untuk kelicikan, muka dua, dan itikad buruk dalam perkara politik. Machiavelli yang kejam, menjadi objek kebencian yang tiada akhir bagi para moralis dengan pendekatan serta sikap konservatif dan revolusioner serupa. Banyaknya citra buruk terkait nama Machiavelli membuat kutukan menjadi seorang penganut Machiavellisme masih menjadi dakwaan serius dalam debat politik. Lantas apa yang berada dibalik reputasi Machiavelli sebagai pendosa? Apakah itu hal yang pantas? Seperti apa pandangan-pandangan politik dan moralitas politik yang sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang hendak ditulis oleh Penulis terutama menampilkan masalah-masalah yang terbukti ia (Machiavelli) hadapi dalam *The Prince*, *The Discourses*, serta karya-karya lain terkait pemikiran politik.

Dalam buku-buku yang ditulisnya, Niccolo Machiavelli memberikan uraian sangat menarik bagaimana seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dalam bidang apapun terutama dalam bidang pemerintahan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Melalui pemikiran Niccolo Machiavelli, penulis hendak menemukan *equilibrium* antara kekuasaan raja yang hidup pada masanya dengan kehidupan berpolitik di Indonesia masa kini. Secara *de facto*, Niccolò Machiavelli adalah seorang filsuf politik dan diplomat Italia yang paling dikenal melalui karyanya "*Il Principe*" (Sang Pangeran). Dalam konteks pemikiran politiknya, Machiavelli menawarkan pandangan yang realistis dan praktis tentang kekuasaan, yang sangat berbeda dari pandangan idealis atau normatif yang dominan pada masanya.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Bagan Alir Kasus

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024 merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia yang melahirkan banyak wacana politik sejak 2004, 2009, 2014, 2019. Wacana-wacana tersebut bermula dari pelanggaran keputusan Mahkamah Konstitusi 16 Oktober 2023, Jumat (Kompas, 26/ 1/2024), terhadap kode etik batas usia dari salah satu calon Wakil Presiden (Gibran Rakabumingraka), sampai pada wacana pelanggaran surat suara di berbagai daerah. Pelanggaran kode etik ini juga melahirkan berbagai protes beberapa Universitas sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar dan mengkhianati demokrasi di Indonesia. Kritik dan perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo menjadi keresahan dan jati diri Presiden sendiri dipertanyakan terutama Presiden sendiri

mengizinkan anak Jokowi (Gibran) untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai wakil presiden periode 2024-2029. Fenomena keresahan merupakan suatu bentuk ketidakselarasan dalam ruang hidup sosial masyarakat Indonesia. Tanda bahwa ketidakselarasan diakibatkan karena Presiden (Joko Widodo) kehilangan kewibawaannya karena dianggap kurang mampu menjaga netralitas situasi politik menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024. Keresahan adalah tanda tidak adanya keselarasan dalam tahun politik di Indonesia sebelum pemilihan presiden maupun wakil presiden karena berbagai isu-isu kecurangan dalam ruang lingkup pemerintahan (Aspinall & Mietzner, 2019). Prinsip demokrasi sejatinya berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Bulman-Pozen & Seifter, 2021), sehingga anggapan bahwa “biarlah rakyat yang menilai atas semua fenomena yang terjadi sebelum pemilihan presiden dan setelah pemilihan presiden Indonesia 2024. Namun, itu bukanlah pokok persoalan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menyoroti isu-isu kecurangan dalam politik yang menyebabkan konsep demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran. Prinsip demokrasi ini seolah-olah dibekukan oleh sekelompok elit politik yang di dalamnya Presiden (Joko Widodo) ikut berintervensi. Demokrasi berada di tangan sekelompok orang dan rakyat dipandang sebagai objek semata karena hanya menunggu keputusan mutlak atau sepihak dari pemerintah yang sedang berkuasa tanpa adanya sikap kritis dari masyarakat yang dalam konteks ini tidak relevan dengan konsep demokrasi itu sendiri (Meskipun berbagai universitas telah melakukan demonstrasi dan kritik terhadap keputusan pemerintah, namun hal ini hanyalah sebuah usaha menjaring angin) (Sweetman et al., 2019; Dhungana & Curato, 2021; Theuwis et al., 2024).

Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, bahwa keadaan belum selaras (Carpenter et al., 2019). Berkaca dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia, ketika *the founding fathers* memosisikan politik sebagai suatu prinsip *bonum commune* dan bukan prinsip kepentingan individu atau kelompok tertentu yang mengatasmakan demokrasi. Mohammad Hatta (Wakil Presiden RI pertama), merupakan tokoh yang mencoba memberikan pendasaran filosofis yang rasional dan modern. Pemikiran Hatta juga memberikan dasar etis dalam berpolitik. Politik tidak lagi menjunjung harkat dan martabat manusia. Politik tidak menjadi wahana perdebatan yang fundamental bagi kepentingan umum, melainkan sekedar pasar taruhan bagi segelintir orang. Politik lepas dari kontrol moralitas yang terdapat dalam diri manusia. Pada titik inilah pandangan Hatta barangkali bisa membantu mengarahkan kita kembali ke orientasi awal dari tujuan pendirian bangsa republik.

Dalam konteks literal yang sudah diuraikan secara rinci dan mendalam, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematik yang sedang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia berlandaskan pemikiran kritis Nicollo Machiavelli tentang kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Dalam usaha ini pula, tulisan ini akan menguraikan lebih spesifik politik di Indonesia yang menjurus kepada usaha mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan berbagai macam cara, bahkan jika hal tersebut merujuk kepada rusaknya esensi dari demokrasi itu sendiri dalam tubuh bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan uraian akan landasan pemikiran Nicollo Machiavelli dan relevansinya dengan politik di Indonesia terutama dalam pesta demokrasi pada tahun 2024 ini. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dan mendialogkan konsep kekuasaan yang digagaskan oleh Nicollo Machiavelli dengan konteks pesta demokrasi di Indonesia, terutama bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah ada. Wacana-wacana menjelang pemilu 2024 diberitakan media baik cetak maupun elektronik bukan tanpa alasan jelas serta data yang akurat untuk mengungkapkan kemunafikan para elit politik dan membuka topeng kemunafikan itu dengan cara membuka topeng kemunafikan para politisi agar secara transparan menyampaikan visi-misi yang dapat menciptakan keselarasan, kemakmuran, kesejahteraan dan bukan perpecahan dan permusuhan.

Dalam sudut pandang etika politik, demokrasi sebagai landasan utama atas roda pemerintahan sedang mengalami stagnan serta kemunduran yang signifikan karena nilai-nilai yang berhubungan dengan integritas dan tanggung jawab pemimpin di negara ini (Presiden Joko Widodo) menciptakan api yang membakar dan menghanguskan kepercayaan rakyat Indonesia dan digantikan dengan kebencian dan rasa mengkhianati demokrasi. Hal inilah menjadi perhatian utama para guru besar di berbagai Universitas dan sebagian rakyat Indonesia yang tetap menginginkan pemilihan umum 2024 sesuai dengan amanat konstitusi negara dan tidak dikaburkan oleh sekelompok orang demi mempertahankan kekuasaan yang ada. Dukungan-dukungan yang dilakukan oleh para akademisi untuk memperkuat budaya dan etika demokrasi yang murni dan sejati merupakan sebuah niat yang perlu diapresiasi demi memperkuat eksistensi demokrasi itu sendiri di tengah situasi para politisi sedang merebut kekuasaan.

Pesta demokrasi di Indonesia bukan hanya menarasikan berbicara tentang kuantitas yang dicapai dari hasil kampanye-kampanye partai serta uraian visi-misi yang harus dilakukan sebelum pemilihan berlangsung. Tuntutan selanjutnya adalah para calon baik Presiden dan Wakil Presiden berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia untuk merealisasikan visi-misi yang sudah dipropagandakan agar seluruh rakyat Indonesia itu sendiri mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam hidup bersama sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila. Kampanye-kampanye partai tidak berhenti pada sebuah usaha untuk mengambil hati rakyat yang akan dinyatakan setelah pemilihan selasi (penghitungan suara oleh KPU), namun merupakan sebuah motivasi dan niat yang sungguh-sungguh untuk berkuasa agar menjadi pelayan seluruh masyarakat Indonesia dengan jalan memenuhi aspirasi-aspirasi mereka (rakyat Indonesia secara umum). Memang harus diakui bahwa pemilihan umum baik pada ranah Legislatif, Yudikatif, maupun Eksekutif terdapat banyak hal yang harus dipenuhi maka sangat dimungkinkan jika ada ruang bagi setiap politisi untuk melakukan tindakan dalam Pemilu. Karena pemilu sering kali mencakup banyak tahapan, maka masuk akal jika ada peluang munculnya pelanggaran dan perselisihan di setiap tahapan tersebut. Kemungkinan penyebabnya mencakup "strategi pemenangan pemilu", "penipuan", atau "kesalahan"—yang semuanya belum tentu melanggar hukum namun merusak kepercayaan publik (perilaku buruk yang bukan merupakan penipuan). Kini saatnya melakukan perampingan Lembaga penegak hukum sekaligus menata ulang gagasan penegakan hukum pemilu untuk memberikan kepastian hukum dalam konteks pemilu yang demokratis dan adil.

Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024: Musibah atau Berkat untuk Masa Depan Indonesia?

Demokrasi di Indonesia sedang berada pada fase keterpurukan. Fase keterpurukan tersebut dimulai dari keputusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi oleh Anwar Usman dan oleh KPU yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka (Putra Presiden Joko Widodo) sebagai salah satu bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PKPU nomor 19 tahun 2023 masih mengatur syarat calon berusia minimal 40 tahun. Dengan kata lain, KPU harus segera merancang perubahan PKPU dan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan hasil dari proses legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia. Ketentuan ini mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, terutama terkait batas usia minimal, yakni 40 tahun. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa). Dalam keputusannya, MK mengubah formulasi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pelanggaran kode etik KPU ini telah memicu sentimen negatif dan kritik. Pencalonan Gibran menjadi problematik dan menjadi keputusan yang fenomenal dan menjadi perdebatan dan isu politik dinasti dan merupakan suatu usaha atau misi tersembunyi Presiden Joko Widodo guna mempertahankan kekuasaannya sebagai figur terhormat di negara ini. Di sisi lain, terdapat usaha yang dilakukan oleh presiden Jokowi sendiri yang tengah membagikan bantuan sosial (bansos) yang diduga melanggar UU APBN dan kecurangan masif. Presiden terbukti mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran dengan membeli suara pemilih demi kepentingan elektoral pasangan calon nomor urut 2 yang notabene anaknya sendiri. Bambang Widjojanto (kuasa hukum Anies-Muhaimin) membandingkan kenaikan anggaran bansos dari 2018 ke 2019 (pemilu sebelumnya) naik Rp 14,6 triliun. Di Pemilu 2024, ada kenaikan anggaran bansos Rp 53,5 triliun, yakni dari Rp 44,3 triliun tahun 2023 menjadi Rp 496,8 triliun pada tahun 2024 (Kompas, 28/9/2024).

Intervensi Presiden Joko Widodo menandakan bahwa dirinya terlibat langsung dalam mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakil presiden RI 2024-2024. Intervensi Joko Widodo menjadi sangat fatal karena hal tersebut dilakukan selama dirinya masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia sampai pada bulan Oktober 2024 nanti. Mahkamah Konstitusi (MK) pun menilai, dalil adanya kecurangan serta pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2024 serta dugaan *came-came*

Presiden Joko Widodo lewat penyaluran bantuan sosial, pengerahan aparaturnegara, dan sumber daya negara lainnya yang tidak terbukti.

Pertimbangan Etika dalam Politik Demokrasi

Prinsip Moral

Prinsip moral selalu merujuk pada karakter manusia sebagai manusia yang bisa berpikir untuk menemukan eksistensi dirinya dalam kehidupan bersama dalam suatu *polis* (Stanley et al., 2021). Prinsip moral pada seseorang selalu memiliki ciri dinamis (Lin & Miller, 2021). Artinya bahwa karakter yang dimiliki oleh subyek selalu memiliki pengaruh terhadap objek lain. Demikian pula halnya dalam hal berpolitik. Berpolitik yang berpijak pada moral yang kurang baik akan membawa pengaruh bagi kehidupan seluruh *demos* dalam suatu *polis* (Adam et al., 2019). Bukan hanya itu, sejarah dan cita-cita suatu negara pun mengalami kemerosotan moral yang parah karena intensi dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kehendak untuk selalu berkuasa pada suatu negara. Aristoteles menulis bahwa identitas antara manusia yang baik dan dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara, yang dalam segala-galanya hidup sesuai dengan aturan negara itu, adalah buruk, barangkali jahat; sebagai manusia; dan sebaliknya, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia, seseorang yang betul-betul bertanggung jawab, akan buru sebagai warga negara, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk di negara itu.

Pemilu yang berlangsung sejak 2004 sampai 2024 menjadi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menilai kemampuan dan kinerja dari para politisi. Kampanye-kampanye dan orasi-orasi politik dilakukan untuk menarik perhatian rakyat untuk memilih calon-calon tertentu. Namun apakah kampanye-kampanye dan orasi politik tersebut dapat menjamin calon-calon tersebut untuk memenuhi janji-janji apabila terpilih menjadi DPR, Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden? Hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa kampanye sungguh-sungguh membawa perubahan hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, sangat penting untuk disadari bahwa pada hakikatnya, negara dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Politik riil merupakan suatu pertarungan kekuatan. Asas Politik juga dianggap sebagai dunia ideal yang tidak mencontohkan kerasnya realitas yang terjadi di dalam politik (Go, 2020). Etika politik sangat dibutuhkan di setiap kondisi baik kondisi normal, tertib, terkendali, atau bahkan kondisi kacau. Terlebih saat kondisi kacau, karena etika politik akan menumbuhkan mekanisme berbicara dengan otoritas atau dalam arti lain bertapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, maka tetap setiap tindakannya memerlukan legitimasi. Legitimasi ini berkaitan dengan norma moral, nilai-nilai, hukum, maupun peraturan.

Di tengah carut-marut isu pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu sebetulnya menggambarkan suatu perubahan terhadap demokrasi itu sendiri yang di dalamnya bangsa Indonesia serta kepercayaan terhadap pemerintah telah dirusak oleh sekelompok orang tertentu yang memiliki misi untuk mempertahankan kekuasaan yang telah ada dengan menghalalkan segala cara. Fenomena politik yang terjadi di Indonesia terutama dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden telah menodai konstitusi negara sebagai anggaran dasar perjalanan hidup bangsa dengan beberapa pelanggaran yang dimulai dari pelanggaran atas batas usia dari salah satu calon wakil presiden (Gibran Rakabuming Raka), sampai pada isu-isu pelanggaran bansos pada situasi pemilihan wakil presiden dan wakil presiden berlangsung. Dapat terbaca bahwa fenomena demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024 ini menjadi suatu harapan atau malapetaka besar bagi rakyat Indonesia dalam menyongsong “Indonesia Emas” pada tahun 2045 mendatang. Berbagai macam pelanggaran etika demokrasi sebelum pemilihan umum menjadi “lampu kuning” dinamika kehidupan pemerintahan Indonesia selanjutnya. Fenomena politik di Indonesia bukan lagi dijadikan sebagai ruang untuk melayani publik dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, namun demi terkokohnya kekuasaan yang sudah ada dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk merusak moral dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, pemikiran Machiavelli masih sangat relevan dengan fenomena politik di Indonesia pada kini. Menurut Machiavelli politik pertama-tama soal kekuasaan, soal bagaimana kekuasaan direbut, direngkuh, dan dengan dijalankan dengan efektif. Karena perkara kekuasaan, filsafat politik mengurus bagaimana seorang raja atau pangeran menjalankan kekuasaannya. “Bila seorang pemimpin untuk membela kekuasaannya harus melakukan sebuah keputusan dan tindakan yang secara moral buruk, ia tidak perlu merasa bersalah.

Integritas dan Kejujuran

Meskipun memilih merupakan hak asasi setiap warga negara, namun sikap abstain dalam demokrasi mengakibatkan masyarakat bersikap apatis terhadap sistem dan penguasa karena tidak melakukan perubahan mendasar sesuai dengan janji-janji pada saat kampanye. Adanya kebebasan dalam negara demokrasi dimana mereka beranggapan bahwa tidak memilih merupakan suatu kebebasan dianggap tidak membawa dampak yang signifikan terhadap bangsa. Kejujuran menjadi lapangan penting bagi setiap orang demi menjaga integritas bangsa. Kejujuran juga menjadi lapangan agar setiap pribadi terutama para politisi lebih transparan untuk memaparkan visi dan misi bangsa yang dapat membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu sarana yang dilakukan untuk menghasilkan penyelenggara pemerintahan yang murni berasal dari pilihan rakyat, dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya sebagai warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bergabung dalam suatu organisasi politik, serta hak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum. Mengenai pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan mengenai Pilpres diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Walaupun telah terdapat aturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, tetapi dalam prakteknya masih seringkali terjadi adanya pelanggaran dan kecurangan. Salah satunya dalam pemilihan umum untuk memilih calon presiden secara langsung atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) banyak menimbulkan problematika di berbagai aspek. Salah satu problematika yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden yang sedang menjabat demi kepentingan anggota partainya yang akan mencalonkan diri pada pemilu mendatang (Baturo & Tolstrup, 2022).

Etika politik memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan umum dan promosi perilaku etis di antara aktor politik. Komunikasi politik, partisipasi masyarakat, dan proses demokrasi semuanya dipengaruhi oleh perilaku etis para aktor politik, menggarisbawahi pentingnya menegakkan etika politik dalam konteks pemilihan umum. Perilaku etis dan integritas politik penting untuk memupuk kepercayaan publik, mempromosikan praktik pemungutan suara yang informatif, dan memajukan cita-cita demokratis dari proses pemilihan umum (Huberts et al., 2021).

Secara *de facto*, keresahan yang paling mendasar bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama para pemerhati demokrasi itu sendiri merupakan tergelincirnya integritas dan kejujuran yang ada dalam pribadi para politisi yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai seorang figure terhormat namun rela menumpulkan kesadaran akan kejujuran hati nurani sebagai tolok ukur eksistensinya sebagai seorang manusia. Pendek kata, apabila seorang pejabat tinggi negara (Presiden), menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri dan keluarga, ia membuktikan bahwa ia secara batiniah sudah miskin karena harus mencari kekayaan di alam lahir yang fana. Begitu pula kekuasaannya merosot menjadi sistem penghisapan kekayaan dan tenaga masyarakat demi keuntungan material tak seimbang segelintir orang di sekitar pusat kekuasaan, hakikat kekuasaan yang sudah menghisap hilang, tinggal tulang-tulangnya yang kering. Tanda seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya. Hal tersebut sebagaimana juga yang dikatakan oleh Machiavelli, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kemanusiaan dan sifat kehevanan pada saat yang sama. Sifat kemanusiaan disimbolkan pada bagaimana kasih sayang dan perilaku saling menolong akibat imbas dari saling membutuhkannya manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, sifat kemanusiaan juga harus diimbangi dengan sifat kehevanan yang memiliki kecenderungan kepuasan terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan haruslah mampu mempertahankan kekuasaannya. Kemampuan itu akan dimiliki apabila pemimpin memiliki kepuasan dalam dirinya sehingga ia dapat mengontrol potensi penyakit-penyakit yang berasal dari luar kekuasaan menggerogoti kekuasaan yang ia miliki. Moralitas gereja terbukti tak mampu menjawab pertanyaan kenapa di Italia terjadi krisis legitimasi kekuasaan. Bagi Machiavelli, moralitas adalah suatu hal yang bisa digunakan untuk keperluan praktis dan diimplementasikan langsung untuk memenuhi kebutuhan solusi atas permasalahan yang ada (Qomariyah, 2024)

Kekuasaan Politik Menurut Machiavelli dan Eksistensi Demokrasi di Indonesia

Berbicara tentang politik kekuasaan, perlu dibuat distingsi lebih dahulu antara politik kekuasaan dan kekuasaan politik. Makna keduanya berbeda. Politik kekuasaan berarti kebijakan atau strategi untuk meraih kekuasaan demi kebaikan bersama (*bonum commune*) atau kesejahteraan bersama, sementara kekuasaan politik berarti kesempatan untuk berpolitik, peluang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan politik menuju kebaikan bersama. Situasi politik di Indonesia secara transparan

dipahami dari kedua perbedaan konsep tersebut dan konsep mana yang sedang dimainkan oleh para politisi di Indonesia saat ini. Politik kekuasaan sangat jelas terabaikan dalam pesta demokrasi di Indonesia saat ini yang bertujuan untuk kebaikan bersama (*bonum commune*), dan sangat jelas bahwa para elit politik yang di mana presiden Republik Indonesia sendiri ikut bermain di dalamnya dengan apa yang disebut “kekuasaan politik” demi mempertahankan kedudukan maupun melanjutkan kedudukannya sebagai orang terpenting di negara ini. Nilai-nilai yang termuat dalam demokrasi dan kebaikan bersama sesungguhnya sedang dalam ambang kehancuran dan nilai-nilai kekeluargaan sedang dikibarkan dalam kurun lima tahun ke depan.

Para akademisi dan pemerhati demokrasi yang didalamnya memuat empat pilar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI agar tidak tergerus oleh sekelompok orang demi kedudukan dan kekuasaan sekelompok orang dan mengabaikan nilai kebaikan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Karena itu, etika bukan melulu penjabaran mengenai teori-teori, tetapi merupakan sebuah desain untuk setiap saat memperjuangkan dan mengejar kebaikan itu dalam keseharian hidup sebagai manusia. Singkat kata, etika itu sesungguhnya mengajukan sebuah tanggung jawab bagi manusia untuk mengajar kebaikan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemendesakan ini sepatutnya menjadikan manusia sadar bahwa sesama adalah dia yang darinya lahir nilai-nilai etis, patut dihargai dan bukanya malah diobjekan, dihancurkan, disingkirkan, atau bahkan dinihilkan. Di sisi lain, usaha mempertahankan karakter fiksional demokrasi selalu rentan terhadap pengungkapan secara rinci mengenai apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik peristiwa, tetapi serupa dengan itu, catatan rinci semacam itu selalu rentan terhadap tuduhan bahwa mereka (para politisi) kehilangan keistimewaan demokrasi, yang kemampuannya adalah mengkonfrontasi kekuasaan dalam istilahnya sendiri, dengan kata-kata yang memahami klaim-klaim populer. Berbicara tentang demokrasi dalam makna yang sangat umum dan tinggi- yakni berusaha mengkonfrontir jargon yang kering dan kosong dengan klaim yang tidak bisa dibantah dari rakyat untuk menyanggah melawan para penguasa, bisa menjadi sarana membongkar salah satu dari topeng kekuasaan.

Machiavelli membagikan tiga dimensi politik yang saling berhubungan: tujuan politik, sarana dan aksi politik. Tujuan mengarahkan pemilihan sarana dan menstrukturkan tindakan. Tujuan politik ideal adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuan ideal adalah prasyarat bagi situasi politik ideal karena mengarahkan pemilihan sarana dan tindakan. Sarana dan tindakan yang sesuai tujuan ideal tidak merugikan masyarakat bahkan lawan politik. Saran-saran Machiavelli menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat tapi kuasa. Keseluruhan isi *Il Principe* berfokus pada satu tujuan: merebut dan mempertahankan kekuasaan. Semua yang menjamin kekuasaan dimanfaatkan secara cerdas oleh politisi sebagai sarana. Manusia, keadilan dan kesejahteraan rakyat—sebagai tujuan tertinggi politik—diturunkan ke level alat.

Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian ini, penulis menemukan beberapa insight baru yang berhubungan dengan konsep kekuasaan menurut Machiavelli serta relevansinya dengan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. Data-data yang mendukung penelitian ini cukup akurat terutama kemerosotan moral dan runtuhnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Dengan berfokus pada persoalan politik yang cukup meresahkan masyarakat karena isu-isu politik yang non etis sangat perlu untuk menciptakan sebuah paradigma baru tentang berpolitik secara jujur dan adil. Hal ini akan terwujud apabila para pemerintah mampu secara transparan dan konsisten terhadap aturan Undang-Undang dan demokrasi agar tidak melahirkan ketidakselarasan dan ketidakadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tegaknya demokrasi dalam tubuh bangsa Indonesia tergantung dari kerjasama antara pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Kerja sama tersebut akan membawa harapan dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia dapat terwujud pada pesta 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia yang jatuh pada tahun 2045 mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini secara rinci, jelas, dan tegas menjawab persoalan pelanggaran etis selama proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berdasarkan konsep kekuasaan Niccolo Machiavelli dalam mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta strategi-strategi yang digunakan demi teguhnya kedudukan pribadi dan membiarkan demokrasi runtuh. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah melayani masyarakat dan membangun kebaikan bersama (*bonum commune*).

References

- Adam, C., Knill, C., & Budde, E. T. (2019). How morality politics determine morality policy output – partisan effects on morality policy change. *Journal of European Public Policy*, 27(7), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1653954>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia’s Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>
- Baturo, A., & Tolstrup, J. (2022). Incumbent takeovers. *Journal of Peace Research*, 60(2), 002234332210751. <https://doi.org/10.1177/00223433221075183>
- Bulman-Pozen, J., & Seifter, M. (2021). The Democracy Principle in State Constitutions. *Michigan Law Review*, 119(119.5), 859. <https://doi.org/10.36644/mlr.119.5.democracy>
- Carpenter, S. R., Folke, C., Scheffer, M., & Westley, F. R. (2019). Dancing on the volcano: social exploration in times of discontent. *Ecology and Society*, 24(1). <https://doi.org/10.5751/es-10839-240123>
- de Villiers, D. E. (2020). The church and the indispensability and fragility of morality revealed by the COVID-19 pandemic. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v76i1.6180>
- Dhungana, N., & Curato, N. (2021). When Participation Entrenches Authoritarian Practice: Ethnographic Investigations of Post-Disaster Governance. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 59, 102159. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102159>
- Duffy, H. (2020). Rules for rulers: Plato’s criticism of law in the *Politicus*. *British Journal for the History of Philosophy*, 28(6), 1053–1070. <https://doi.org/10.1080/09608788.2020.1750347>
- Go, J. (2020). Facts, principles, and global justice: does the “real world” matter?. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 26(6), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1811541>
- Huberts, L., Kaptein, M., & de Koning, B. (2021). Integrity Scandals of Politicians: A Political Integrity Index. *Public Integrity*, 24(3), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.1940778>
- Kodera, S. (2022). Between admiration, deception, and reckoning: Niccolò Machiavelli’s economies of esteem. *Intellectual History Review*, 32(1), 33–49.
- Ladkin, D., & Probert, J. (2019). From sovereign to subject: Applying Foucault’s conceptualization of power to leading and studying power within leadership. *The Leadership Quarterly*, 32(4), 101310. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101310>
- Lin, S. C., & Miller, D. T. (2021). A dynamic perspective on moral choice: Revisiting moral hypocrisy. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 164, 203–217. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2021.02.005>
- Lührmann, A., & Rooney, B. (2020). Autocratization by Decree: States of Emergency and Democratic Decline. *Comparative Politics*, 53(4). <https://doi.org/10.5129/001041521x16004520146485>
- Maher, A. (2020). The power of “wealth, nobility and men:” Inequality and corruption in Machiavelli’s Florentine Histories. *European Journal of Political Theory*, 19(4), 512–531. <https://doi.org/10.1177/1474885117730673>
- Maiwan, M. (2019). Antara Virtue dan Fortune: Suatu Dimendi dalam Pemikiran Machiavelli. *Jurnal Ilmiah MIMBAR Demokrasi*, 19(01), 39–61. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12952>
- Mukhtar, M. (2018). Penguasa dan Kekuasaan dalam Pandangan Komunikasi Politik Komunikasi Politik Machiavelli. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 56–76. <http://dx.doi.org/10.30829/komunikologi.v2i1.5458>
- Qomariyah, N. (2024). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli). *Herodotus*, 6(3), 352–352. <https://doi.org/10.30998/herodotus.v6i3.15729>
- Raine, A., & Uh, S. (2019). The Selfishness Questionnaire: Egocentric, Adaptive, and Pathological Forms of Selfishness. *Journal of Personality Assessment*, 101(5), 1–12. <https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1455692>

- Schroeder, S. A. (2021). Democratic Values: A Better Foundation for Public Trust in Science. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 72(2), 545–562. <https://doi.org/10.1093/bjps/axz023>
- Stanley, M. L., Henne, P., Niemi, L., Sinnott-Armstrong, W., & De Brigard, F. (2021). Making moral principles suit yourself. *Psychonomic Bulletin & Review*, 28(5), 1735–1741. <https://doi.org/10.3758/s13423-021-01935-8>
- Suftyadi, A. R., Heniarti, D. D., & Nu'man, A. H. (2023). Oligarchic Politics in the Context of a Democratic Rule of Law in Relation to the Principle of Expediency. *Journal of Legal Studies*, 32(46), 67–77. <https://doi.org/10.2478/jles-2023-0012>
- Sweetman, J., Maio, G. R., Spears, R., Manstead, A. S. R., & Livingstone, A. G. (2019). Attitude toward protest uniquely predicts (normative and nonnormative) political action by (advantaged and disadvantaged) group members. *Journal of Experimental Social Psychology*, 82, 115–128. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.01.001>
- Theuwis, M.-I., Van Ham, C., & Jacobs, K. (2024). A meta-analysis of the effects of democratic innovations on participants' attitudes, behaviour and capabilities. *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12722>
- Tholen, B. (2018). Political Responsibility as a Virtue: Nussbaum, MacIntyre, and Ricoeur on the Fragility of Politics. *Alternatives*, 43(1), 22–34. <https://doi.org/10.1177/0304375418777178>
- Vavouras, E., & Theodosiadis, M. (2024). The Concept of Religion in Machiavelli: Political Methodology, Propaganda and Ideological Enlightenment. *Religions*, 15(10), 1203–1203. <https://doi.org/10.3390/rel15101203>
- Zhang, X., Zang, L., Bai, W., & Liu, H. (2024). Big data analysis and application of library information resources. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/amns-2024-1212>